

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Begitupun dengan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan investasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. (Dumairy, 1996: 13).

Setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan rata-rata per tahun relatif masih labat apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh Pemerintahan Orde Baru khususnya pada periode 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Salah satu penyebabnya yaitu masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk investasi dari luar terutama dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Padahal era Orde Baru membuktikan bahwa PMA merupakan

faktor pendorong yang sangat penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama PMA mendorong perkembangan teknologi, pertumbuhan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia. (**Tulus Tambunan**, 2005: 3). Perkembangan PMA di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Perkembangan Investasi Asing di Indonesia Periode 1980-2005**

Tahun	Proyek PMA	Nilai PMA (juta US\$)	Perubahan (juta US\$)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	21	1.081,30	-	-
1981	24	747,00	-334,30	-30,92
1982	32	2.456,10	1.709,10	228,80
1983	46	2.436,80	-19,30	-0,79
1984	23	1.121,10	-1.315,70	-53,99
1985	46	913,10	-208,00	-18,55
1986	93	1.056,80	143,70	15,74
1987	141	1.918,10	861,30	81,50
1988	147	4.447,70	2.529,60	131,88
1989	308	4.898,30	450,60	10,13
1990	444	9.639,60	4.741,30	96,79
1991	390	9.030,20	-609,40	-6,32
1992	304	10.466,10	1.435,90	15,90
1993	330	8.153,80	-2.312,30	-22,09
1994	444	27.046,40	18.892,60	231,70
1995	782	39.891,60	12.845,20	47,49
1996	947	29.941,00	-9.950,60	-24,94
1997	783	33.816,10	3.875,10	12,94
1998	1.034	13.585,50	-20.230,60	-59,83
1999	1.174	10.892,20	-2.693,30	-19,82
2000	1.524	15.426,20	4.534,00	41,63
2001	1.333	15.055,90	-370,30	-2,40
2002	1.135	9.744,10	-5.311,80	-35,28
2003	1.060	13.596,40	3.852,30	39,53
2004	1.190	10.279,80	-3.316,60	-24,39
2005	1.648	13.544,00	3.264,20	31,75
<b>Jumlah</b>	<b>15.403</b>	<b>291.185,20</b>	<b>12.462,70</b>	<b>686,46</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>592</b>	<b>11.199,43</b>	<b>498,51</b>	<b>27,46</b>

Sumber: BKPM, BPS (data diolah)

Nilai PMA periode 1980-2005 sebesar 291.185,20 juta US\$, rata-rata per tahun sebesar 11.199,43 juta US\$, rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 498,51 juta US\$ atau sebesar 27,46%. Perkembangan PMA sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang cukup tinggi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil; sedangkan setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998 justru sebaliknya, perkembangan PMA di Indonesia buruk sekali bahkan pertumbuhannya negatif. Perbandingan perkembangan PMA sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1997/1998 dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Perkembangan PMA sebelum Krisis Ekonomi 1997-1998**

<b>Tahun</b>	<b>Proyek PMA</b>	<b>Nilai PMA (juta US\$)</b>	<b>Perubahan</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	21	1.081,30	-	-
1981	24	747,00	-334,30	-30,92
1982	32	2.456,10	1.709,10	228,80
1983	46	2.436,80	-19,30	-0,79
1984	23	1.121,10	-1.315,70	-53,99
1985	46	913,10	-208,00	-18,55
1986	93	1.056,80	143,70	15,74
1987	141	1.918,10	861,30	81,50
1988	147	4.447,70	2.529,60	131,88
1989	308	4.898,30	450,60	10,13
1990	444	9.639,60	4.741,30	96,79
1991	390	9.030,20	-609,40	-6,32
1992	304	10.466,10	1.435,90	15,90
1993	330	8.153,80	-2.312,30	-22,09
1994	444	27.046,40	18.892,60	231,70
1995	782	39.891,60	12.845,20	47,49
1996	947	29.941,00	-9.950,60	-24,94
<b>Jumlah</b>	<b>4.522</b>	<b>155.245,00</b>	<b>28.859,70</b>	<b>702,33</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>251</b>	<b>8.624,72</b>	<b>1.697,63</b>	<b>41,31</b>

Sumber: BKPM, BPS (data diolah)

Perkembangan PMA periode 1980-1996 yaitu proyek PMA sebanyak 4.500, nilai PMA sebesar 155.245,00 juta US\$, rata-rata nilai setiap tahunnya sebesar 8.624 juta US\$ dengan pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1.697,63 juta US\$ atau sebesar 41,31% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PMA pada masa era Orde Baru jauh lebih baik daripada pasca-krisis ekonomi 1997/1998, kondisi ini didukung oleh stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia yang baik dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6,5%. (NK dan APBN, 1980-1996: 112-150).

**Tabel 1.3 Perkembangan PMA sejak Krisis Moneter 1997-2005**

<b>Tahun</b>	<b>PMA</b>	<b>Nilai PMA (juta US\$)</b>	<b>Perubahan</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1997	783	33.816,10	-	-
1998	1.034	13.585,50	-20.230,60	-59,83
1999	1.174	10.892,20	-2.693,30	-19,82
2000	1.524	15.426,20	4.534,00	41,63
2001	1.333	15.055,90	-370,30	-2,40
2002	1.135	9.744,10	-5.311,80	-35,28
2003	1.060	13.596,40	3.852,30	39,53
2004	1.190	10.279,80	-3.316,60	-24,39
2005	1.648	13.544,00	3.264,20	31,75
<b>Jumlah</b>	<b>10.881</b>	<b>135.940,20</b>	<b>-20.272,10</b>	<b>-28,81</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1360</b>	<b>16.992,53</b>	<b>-2.896,01</b>	<b>-4,12</b>

Sumber: BKPM, BPS (data diolah)

Perkembangan PMA sejak krisis ekonomi 1997/1998 sampai tahun 2005, pertumbuhannya belum sebaik dan seintensif perkembangan PMA pada periode 1980-1996. Sejak tahun 1997-2005 tercatat proyek investasi sebanyak 10.881, nilai PMA sebesar 135.940,20 juta US\$, rata-rata pertumbuhan per tahun -2.896,01 juta US\$ atau -4,12% per tahun.

Pertumbuhan PMA setelah krisis ekonomi 1997/1998 yang negatif tersebut dipengaruhi oleh buruknya iklim investasi di Indonesia. Buruknya iklim investasi tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi, infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu perburuhan), regulasi perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah tata laksana (*good governance*) termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi netto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan PMA. (Tulus Tambunan, 2006: 10).

Iklim investasi Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan dan perilaku nyata dari pemerintah atas biaya, resiko, dan pembatasan bagi persaingan yang dihadapi perusahaan. Menurut **Asian Development Bank** (2005: 10) data yang diperoleh dari "*Survey Iklim Investasi dan Produktivitas di Indonesia 2003*", sekitar 77% dari perusahaan yang disurvei mengeluh atas ketidakjelasan dalam pelaksanaan pajak, sementara sekitar 73% mengeluhkan tentang tingginya tingkat pajak; sekitar 40% tidak yakin dengan sistem hukum yang ada akan menjamin kontrak dan hak-hak mereka, 60% beranggapan bahwa pejabat pemerintah tidak konsisten dan tidak dapat diperkirakan; hambatan bisnis lebih dirasakan oleh perusahaan berskala besar dan luas (mempunyai tempat usaha dan jenis produk lebih dari satu), hal ini berkaitan dengan perbedaan peraturan daerah yang dapat menghambat jaringan usaha lebih luas.

Laporan dari **World Bank** tahun 2005 (dalam **Tulus Tambunan**, 2006: 12), menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia sangat buruk. Untuk jaringan telepon tetap, posisi Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara ASEAN; kelistrikan berada pada urutan ke-8 dari 12 negara ASEAN; akses air bersih berada pada posisi ke-7 dari 11 negara ASEAN, dan untuk jaringan jalan raya berada pada posisi ke-8 dari 12 negara ASEAN. Buruknya infrastruktur akan menghambat masuknya PMA, karena berpengaruh terhadap kelancaran produksi dan perdagangan dalam negeri maupun ekspor, selanjutnya berarti beban biaya bagi PMA yang semakin tinggi.

Data lain yang menunjukkan buruknya kondisi infrastruktur Indonesia adalah **Asian Development Bank** (2005: 14), berdasarkan “*Survey Iklim Investasi dan Produktivitas di Indonesia 2003*”, sekitar 37% perusahaan yang disurvei menganggap pelayanan listrik menjadi hambatan utama apabila dibandingkan dengan telekomunikasi dan transportasi. Untuk mendapatkan sambungan listrik rata-rata diperlukan waktu 15 hari. Pengalaman terburuk terjadi pada industri elektronik yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari. Untuk sambungan telepon, rata-rata dibutuhkan waktu 27 hari. Waktu terlama terjadi pada industri perkayuan yang mencapai waktu sekitar 50 hari.

Hal lain yang memperburuk iklim investasi di Indonesia adalah masalah perizinan. Perizinan usaha di Indonesia dinilai masih tumpang tindih antara pusat dan daerah yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Menurut laporan **World Bank** (2004: 250), tahap perizinan dan implementasi proyek investasi di Indonesia sering tertunda karena untuk mengurus berbagai perizinan

membutuhkan waktu 168 hari dengan biaya mencapai rata-rata 14,5% dari pendapatan. Biaya perizinan tersebut masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan perizinan usaha (investasi) di negara berkembang lainnya seperti Philipina sebesar 13,5%, India sebesar 13,4%, Malaysia sebesar 10,9%, Georgia sebesar 9,9%, Armenia sebesar 9,0% dan Nigeria sebesar 3,3%.

Menurut **World Bank** (2005: 2-7) bahwa PMA merupakan hal pokok bagi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. PMA akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi, pada akhirnya akan meningkatkan PDB. Di sisi lain iklim investasi akan mengurangi kemiskinan yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan menyediakan sejumlah barang yang dibutuhkan.

Buruknya iklim investasi dan pertumbuhan PMA di Indonesia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yaitu menyebabkan rendahnya pendapatan nasional yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi; di sisi lain akan menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan atau rendahnya pendapatan, pada akhirnya kondisi ini akan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika masalah ini dibiarkan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk. Untuk menanggulangi masalah ini harus dicari alternatif pemecahannya, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena PMA di Indonesia dan menuangkannya dalam judul: **“PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, INFRASTRUKTUR DAN PERIZINAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA PERIODE 1980-2005”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap PMA di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap PMA di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh perizinan terhadap PMA di Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap PMA di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap PMA di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perizinan terhadap PMA di Indonesia.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal, infrastruktur, dan perizinan terhadap perkembangan PMA di Indonesia.
2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah PMA di Indonesia.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai investasi, khususnya PMA.



#### 1.4 Kerangka Pemikiran

**John Maynard Keynes** mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep marginal kapital (*marginal efficiency of capital* atau *MEC*). *MEC* dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expended net rate of return*) atas pengeluaran tambahan. *MEC* juga dapat diartikan tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyatakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. (Muana Nanga, 2001: 124).

**Teori Akselerator** memusatkan perhatian pada hubungan antara permintaan akan barang modal (*capital goods*) dan permintaan akan produk akhir (*final goods*), dimana teori ini mengasumsikan adanya *capital output ratio* (*COR*) yang ditentukan oleh kondisi teknis produksi.

$$\frac{K}{Y} = k \quad (1.1)$$

dimana  $K$  = jumlah kapital yang digunakan,  $Y$  = tingkat output agregat,  $k$  = rasio kapital – output yang tetap (*fixed capital output ratio*).

Investasi bersih (*net investment*) pada periode waktu  $t$ ,  $I_t$ , secara definisi adalah sama dengan perubahan di dalam stok kapital sepanjang kurun waktu  $t$ , maka secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} I_t &= K_t - K_{t-1} \\ &= k(Y_t - Y_{t-1}) \\ &= k \cdot \Delta Y_t \end{aligned} \quad (1.2)$$

Rumus tersebut dikembangkan menjadi:

$$K_t = K_{t-1} + \lambda (K_t^* - K_{t-1}) \quad (0 < \lambda < 1) \quad (1.3)$$

dimana  $K_t$  = stok kapital pada periode  $t$ ,  $K_{t-1}$  = stok kapital aktual pada periode  $t-1$ ,  $K^*_t$  = stok kapital yang diinginkan, dan  $\lambda$  = suatu konstanta yang nilainya terletak antara 0 dan 1. (Muana Nanga, 2001: 126).

**Teori Dana Internal** (*internal funds theory of investment*) menyatakan bahwa stok kapital yang diinginkan dan juga investasi, bergantung pada tingkat keuntungan. **Jan Tinbergen**, menyatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profit*). Karena investasi bergantung pada keuntungan yang diharapkan, maka investasi adalah berhubungan secara positif dengan *realized profits*. Teori Dana Internal mengatakan stok kapital yang diinginkan dan investasi ditentukan oleh keuntungan. Kebijakan yang ditekankan yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dimana penurunan dalam pajak pendapatan perusahaan akan menyebabkan kenaikan yang signifikan di dalam stok kapital yang diinginkan dan investasi. (Muana Nanga, 2001: 129).

**Teori Neo Klasik** (*Neoclassical Theory of Investment*) merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut Teori Neo Klasik stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga jasa kapital relatif terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Kenaikan di dalam pengeluaran pemerintah atau penurunan di dalam pajak pendapatan perusahaan akan mendorong investasi melalui dampaknya atas permintaan agregat, dan selanjutnya output. (Muana Nanga, 2001: 130).

**Kebijaksanaan Fiskal** adalah kebijaksanaan makro yang dilaksanakan melalui APBN. (Boediono, 1993: 109). Menurut Kusnendi (2002: 129), kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua yaitu (1) Kebijakan fiskal ekspansif (*fiscal expansion policy*) yang ditandai oleh kenaikan konsumsi pemerintah ( $G$ ), kenaikan transfer ( $T_r$ ) dan penurunan pajak ( $T_x$ ); (2) Kebijakan fiskal kontraksi (*fiscal contraction policy*) atau (*fiscal consolidation policy*) yang ditandai oleh penurunan konsumsi pemerintah, penurunan transfer, dan kenaikan pajak.

**Kebijakan Fiskal Ekspansif** yaitu kenaikan konsumsi pemerintah dan kenaikan pembayaran transfer akan menyediakan sarana dan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan disposibel ( $Y$ ). Kenaikan pendapatan disposibel akan menaikkan pengeluaran konsumsi ( $C$ ). Peningkatan konsumsi mendorong permintaan agregat ( $AG$ ) semakin tinggi (termasuk arus investasi masuk atau *crowding in of investment* semakin tinggi). Namun di sisi lain kenaikan permintaan agregat akan menaikkan suku bunga, tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan arus investasi keluar (*crowding out of investment*). *Crowding out of investment* akan berdampak negatif karena sektor ini merupakan akselerator bagi suatu perekonomian. Dengan demikian maka output juga akan menurun, tetapi penurunan output ini lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan output akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. (Ardi Nova dan Andre R. Daud, 2006: 1-6)

Menurut **Laporan World Bank** (2005: 37), pada realitanya keputusan investasi dipengaruhi peran pemerintah yang kuat dalam hal:

1. Biaya, yaitu berhubungan dengan korupsi, pajak, beban peraturan (birokrasi), biaya infrastruktur dan sektor keuangan;
2. Resiko, yaitu arah kebijakan yang dapat diduga kredibilitasnya, stabilitas ekonomi makro, hak-hak atas properti, pemaksaan kepatuhan atas perjanjian/kesepakatan, penarikan hak atas properti guna kepentingan umum;
3. Pembatasan bagi persaingan, yaitu pembatasan peraturan untuk masuk dan keluar, hukum dan kebijakan persaingan, memfungsikan pasar sektor keuangan dan infrastruktur.

Menurut **World Bank** (2004: 10), kinerja infrastruktur Indonesia masih rendah, dalam hal kelistrikan 90 juta orang tidak mendapatkan sambungan listrik (43% dari jumlah penduduk, yang sebagian besar (90%) adalah kelompok miskin). Biaya sambungan di daerah pedesaan 33% lebih mahal daripada di perkotaan. Kebutuhan investasi sangat tinggi untuk memperluas kapasitas listrik diperlukan sekitar 15-17 miliar US\$ sebelum tahun 2012 untuk menambah 9.700 MW kapasitas. Untuk air bersih dan sistem sanitasi sekitar 22% penduduk tidak mendapatkan akses air bersih, dan hanya 14% yang dilayani oleh PDAM. Sekitar 1,3% mempunyai akses terhadap jaringan pembuangan limbah manusia. Selain itu, PDAM sendiri bermasalah 2/3 PDAM beroperasi selalu merugi, 40% air tidak dihitung dan tarif di bawah biaya operasional. Untuk jaringan telepon masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kepadatan telepon sambungan tetap 4% dan cakupan layanan ke pedesaan masih sangat terbatas.

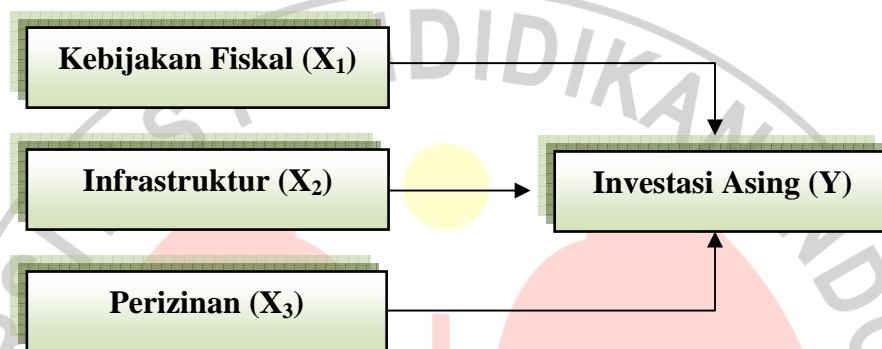
Kebutuhan investasi sangat tinggi, diperlukan sekitar 33 juta US\$ untuk meningkatkan *teleditasy* 1%. Sementara bisnis selular terus berkembang, rata-rata 77% per tahun sejak tahun 1995. Untuk jalan raya masih sangat terbatas hanya 1,7 Km per 1000 penduduk, hampir 50% dalam kondisi rusak akibat kurangnya pemeliharaan, terutama jaringan jalan kabupaten. Pengeluaran pemerintah untuk transportasi jalan terus menurun, dari 22% tahun 1993 menjadi 11% untuk anggaran tahun 2000.

Menurut **Mudrajad Kuncoro** (2005: 5) dalam *Batam dan Reformasi Iklim Investasi*. Hambatan usaha di Indonesia yaitu masih adanya uang pelicin (*grease money*) dalam bentuk pungutan liar (*pungli*) dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Rata-rata *pungli* terhadap biaya ekspor setahun mencapai 7,5% atau Rp 3 trilyun atau 153 juta US\$. Temuan lain yaitu tahap perizinan dan implementasi proyek investasi sering tertunda karena untuk mengurus berbagai perizinan butuh waktu sekitar 168 hari dengan biaya dapat mencapai rata-rata 14,5% dari rata-rata pendapatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, investor yang akan menanamkan modalnya dipengaruhi oleh keuntungan yang diharapkan dan resiko yang akan dihadapi. Buruknya iklim investasi Indonesia berdampak pada rendahnya PMA, salah satunya diakibatkan oleh stabilitas ekonomi yang masih rendah dan tingginya biaya investasi. Faktor dominan yang mempengaruhi PMA diantaranya kebijakan pemerintah berupa kebijakan fiskal, kondisi infrastruktur dan perizinan. Oleh karena itu, jika kebijakan fiskal ekspansif (pengeluaran pemerintah semakin

besar), kondisi infrastruktur yang semakin baik, dan perizinan semakin sederhana (murah dan cepat) akan mendorong kegiatan PMA di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban tentatif (sementara) terhadap masalah penelitian yang dibangun berdasarkan kerangka teoretis tertentu yang kebenarannya perlu diuji secara empiris. (Kusnendi, 2005: 28). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia.
2. Infrastruktur berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia.
3. Perizinan berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia.